



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Sekretariat Jenderal

TAHUN 2024



@Kemenhub151



KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Triwulan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk penjabaran pencapaian target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan gambaran perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal selama kurun waktu bulan Juli sampai dengan September tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dan anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, kami berharap dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 Sekretariat Jenderal dapat menyajikan informasi yang lengkap bagi seluruh pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sekaligus menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Oktober 2024

Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R.

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Abdul Wahid Tuasikal	Koordinator Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut	23/10/2024	
2.	Diperiksa	Said Moammar Khadafi	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi	23/10/24	
3.	Disetujui	Sigit Widodo	Kepala Biro Perencanaan	25/10/24	



KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Triwulanan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk penjabaran pencapaian target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan gambaran perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal selama kurun waktu bulan Juli sampai dengan September tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dan anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, kami berharap dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 Sekretariat Jenderal dapat menyajikan informasi yang lengkap bagi seluruh pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sekaligus menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, ~~20~~ Oktober 2024

Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan, Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pelaksanaan fungsi lainnya.

Sampai dengan akhir bulan September tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan September sebesar **Rp425.015.588.738,- (empat ratus dua puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau **64,91% (enam puluh empat koma sembilan puluh satu persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp229.780.016.262,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)** atau **35,09% (tiga puluh lima koma nol sembilan persen)** dari total alokasi anggaran.

Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 terdapat reviu Renstra yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal. Adapun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir September 2024 mencapai **36,77%**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

1. IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian sebesar 100%;
2. IKP 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 dengan capaian 10,30%;
3. IKP 3 adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian masih 0% dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 PERJANJIAN KINERJA.....	5
BAB II	18
ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
2.1 PENGUKURAN KINERJA	18
2.2 REALISASI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN III TAHUN 2024.....	19
2.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA.....	19
 IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”	19
2.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA	23
 IKP2 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ Pada Tahun 2024”	23
2.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA.....	27
 IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	27
2.2.4 CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL.....	31
2.3 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN III TAHUN 2024	33
2.4 KENDALA YANG DIHADAPI TRIWULAN III SEKRETARIAT JENDERAL	40
BAB III.....	42
PENUTUP	42
3.1 KESIMPULAN.....	42
3.2 SARAN	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penyesuaian Target pada Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024	8
Tabel 1. 2 Penyesuaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024.....	9
Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	13
Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.	14
Tabel 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP1 Triwulan III Tahun 2024	19
Tabel 2. 2 Daftar Peraturan Menteri yang di tetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024	20
Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP2 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK	23
Tabel 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP3 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK	27
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024	31
Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan III tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	34
Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran Triwulan III UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	35
Tabel 2. 8 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024.....	36
Tabel 2. 9 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Triwulan III 2024	37
Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Belanja Modal Setjen Triwulan III 2024	37
Tabel 2. 11 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2024 Tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	4
Gambar 1. 2 Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024.....	14
Gambar 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024.....	20
Gambar 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 2 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Alur Pelaporan Penurunan Emisi GRK.....	26
Gambar 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 3 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024.....	28



BAB - I

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi

1.3 Perjanjian Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan tercantum dalam PM 85 Tahun 2020 perihal Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam PM 17 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, masuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat peraturan tersebut, karena disamping bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*). Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Triwulan III Sekretariat Jenderal tahun 2024. Laporan Triwulan III Sekretariat Jenderal tahun 2024 menggambarkan secara transparan sejauh mana pencapaian kinerja melalui upaya – upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama ditetapkan diawal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.



Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Perhubungan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Selain itu terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal yaitu Pusat Data dan Informasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon II yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro yang hingga saat ini sama dengan organisasi tata kerja yang sebelumnya, yaitu:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Pusat sebagai unsur penunjang, berdasarkan hasil reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Setjen 2020-2024 dari yang sebelumnya hanya mempunyai 3 (tiga) Pusat terdapat penambahan 2 Pusat yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Jadi unsur penunjang pada unit kerja Sekretariat Jenderal berdasarkan kepada Permenhub Ortaker terbaru terdiri dari :

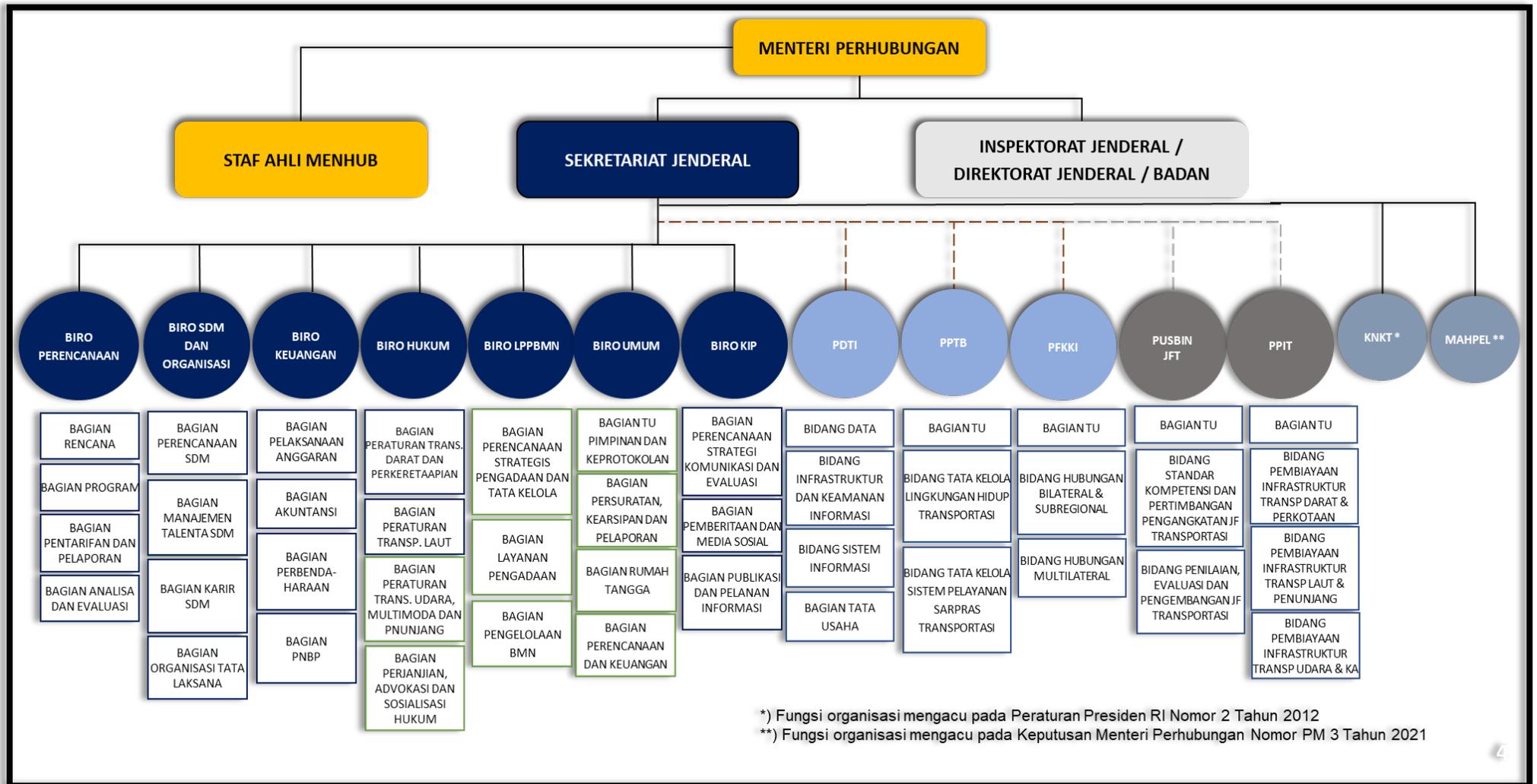
1. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

Selain itu, terdapat juga 2 (dua) unsur penunjang lainnya yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan yaitu:

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Mahkamah Pelayaran.



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



1.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2024 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal.

Dilakukannya reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 dilatar belakangi oleh adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Jenderal dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan berdasarkan rekomendasi Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode (EAP) Renstra Setjen 2020-2024 yang telah dilakukan, perlunya dilakukan reviu renstra setjen dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain memerlukan penyempurnaan pada beberapa Indikator Kinerja (IK) yang memerlukan penyesuaian target, serta terdapat beberapa indikator kinerja yang diusulkan digabung menjadi satu, tentunya dengan cara menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Renstra Setjen 2020-2024 dalam sistem perencanaan yang ada di Sekretariat Jenderal sehingga dihasilkan dokumen Renstra 2020-2024 yang efektif dan akurat.

Sebagai turunan dari Renstra Kementerian Perhubungan, maka reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2020-2024 dengan muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat Jenderal.

Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyesuaikan Indikator Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang mengalami perubahan sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 terdapat penyesuaian pada 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Pada target IK Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class*



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/Ditetapkan yang semula target tahun 2024 sebesar 0.10 menjadi 0 karena sudah tidak ada Peraturan Menteri yang mendapat *Class Action*.

2. Pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi terdapat penyesuaian penyebutan satuan dan target yang disesuaikan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Untuk sasaran strategis Sekretariat Jenderal sebanyak **3 (tiga) Sasaran Program/strategis** masih sama sampai dengan tahun 2024.

Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Jenderal didukung dengan sasaran kegiatan di lingkungan sekretariat jenderal, secara umum mengalami perubahan yang sebelumnya sebanyak **10 (sepuluh) sasaran menjadi 9 (sembilan) sasaran yaitu:**

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi.
3. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan Yang Bersih dan Akuntabel.
4. Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan.
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
7. Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan.
8. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.
9. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja program, Namun demikian berdasarkan rewiu dan telaahan terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan terbitnya **PERMENPANRB No: 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas PERMENPANRB No: 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:**

1. Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan Indeks Merit System diintegrasikan ke dalam indikator Indeks Merit System;
2. Pada indikator Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan, Setelah dilakukan penajaman pada *Road Map* RB, untuk Indikator Kepemimpinan Perubahan tidak dilanjutkan;
3. Indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan dan indeks pengelolaan aset, Setelah dilakukan penajaman pada *Road Map* RB ke-3 Indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan dengan Indeks SPBE.

Selain itu terdapat beberapa **perubahan pada target untuk tahun 2024 – 2024** pada indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

1. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 78 menjadi 60 dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 79 menjadi 60 karena Biro Hukum harus menentukan Target Kinerja bersama sama dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan;
2. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan mengalami perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 3,96 menjadi 3 dan pada tahun 2024 yang semula 4,03 menjadi 3,75 dikarenakan Perubahan aturan dari Menpan RB yang semula 3 domain, 35 indikator menjadi 4 Domain, 47 Indikator;
3. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 70 menjadi 2,9 dan pada tahun 2024 yang semula 75 menjadi 2,95 karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4;
4. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal, perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 78 (satuan nilai) menjadi 3 (satuan indeks) dan tahun 2024 yang semula 80 (satuan nilai) menjadi 3,1 (satuan indeks) karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4.

Adapun dengan terbentuknya dua Unit Kerja baru di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin Jabfung) dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) maka, sebagai bentuk kontribusi kinerja Sekretariat Jenderal, terdapat **2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan baru yaitu:**

1. IKK 3.15 yaitu "Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi"; dan;
2. IKK 3.22 yaitu "Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi /pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi"

Dengan adanya beberapa penyesuaian yang tercantum dalam Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, maka berikut adalah matriks semula - menjadi atas Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 yang dijelaskan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut:



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Tabel 1. 1 Penyesuaian Target pada Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024

Sasaran Strategis		SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentang Renstra Setjen 2020 – 2024)				MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)			
		Indikator Kinerja Program		Tahun 2024		Indikator Kinerja Program		Tahun 2024	
				Satuan	Target			Satuan	Target
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,10	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	4,61	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Tabel 1. 2 Penyesuaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	75	SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	78			1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	%	89,96	SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	%	100
SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	78	SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	80			3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
		3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92			3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92,3
		3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92			3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92,3
		3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,5			3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)					MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)						
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
		3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	84			3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
		3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	84			3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	75			3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	88,2			3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90.2
		3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	70			3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2.95
		3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	78			3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3.10
		3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	73			3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	74
SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan	3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	79,5	SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan organisasi Kementerian Perhubungan	3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
		3.14	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	74			3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
		3.15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	0,96						
		3.16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Sekretariat Jenderal	Nilai	0,96						
		3.17	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,96						
								3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	82
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3.18	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,4	SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45
SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3.19	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	76	SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 3.5	Meningkatnya kualitas kepemimpinan dalam	3.20	Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan	Nilai	74						



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
	meningkatkan budaya kinerja										
SK 3.6	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	3.21	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,96	SK 3.5	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,75
SK 3.7	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	3.22	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	56	SK 3.6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi	3.19	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	58
		3.23	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	71			3.20	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
SK 3.8	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3.24	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	86	SK 3.7	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87
								3.22	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi /pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	%	75



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Berdasarkan penjelasan pada matriks di atas, dapat disampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang telah dilakukan revisi berdasarkan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Jenderal dan demi tercapainya target kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2023 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**

Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2024

Berdasarkan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-218/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Maret 2024 Hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan TA 2024, telah ditetapkan dan disahkan usulan Revisi Anggaran TA.2024 dalam hal pagu anggaran tetap yaitu pergeseran antar Eselon I untuk kekurangan Belanja Operasional sebesar Rp5.302.430.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana pergeseran anggaran ke Sekretariat Jenderal didapatkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga pagu Efektif Sekretariat Jenderal saat ini sebesar



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah).



Gambar 1. 2 Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024

Selain itu, terdapat 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	%	100
SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
		IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92,30
		IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92,30
		IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
		IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
		IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		IKK 3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	80
		IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2
		IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2,95
		IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3,10
		IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	74
SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
		IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	82
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45
SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 3.5	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,75
SK 3.6	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 3.19	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	58
		IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 3.7	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87
		IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	%	75



BAB - II

2.1 Pengukuran Kinerja

2.2 Realisasi Kinerja

2.3 Realisasi Anggaran



BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja pada tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang *up to date* mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKP organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKP akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Capaian kinerja Sasaran Strategis (SP) unit kerja Sekretariat Jenderal dicapai melalui: (1) identifikasi IKP pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKP, (2) setiap IKP dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui perbandingan realisasi dengan targetnya, dan (3) nilai capaian kinerja setiap IKP dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok IKP yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKK merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKP dimaksud.

Pada dokumen Laporan Triwulan III Tahun 2024 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2024, namun juga tindak lanjut dalam mencapai target IKP agar dapat tercapai di akhir tahun 2024. Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama bulan Juli sampai dengan September tahun 2024.

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$



- 2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{((\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2.2 REALISASI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN III TAHUN 2024

Realisasi kinerja Sekretariat Jenderal Triwulan III tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja program, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA

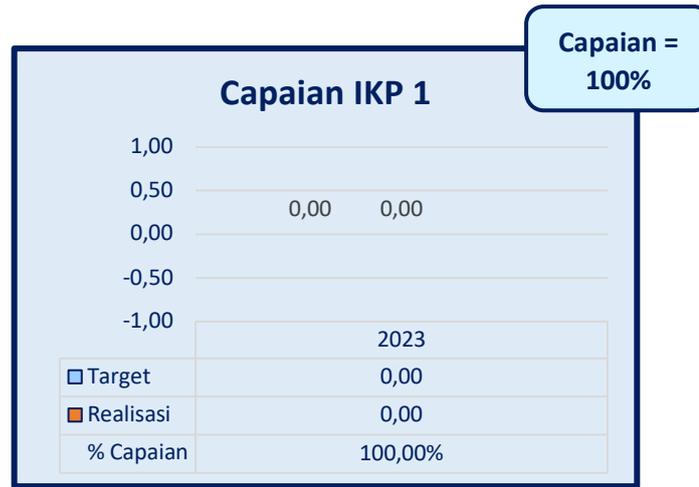
Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum”, terdiri dari 1 (satu) IKP, antara lain;

IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **Biro Hukum**, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan pada akhir September 2024 mendapatkan capaian senilai **0 atau 100%** yang rinciannya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP1 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Juli	Ags	Sep	
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100



Gambar 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024

Sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024, Peraturan Menteri Perhubungan yang ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri. Dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *Class Action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada tahun 2024 menjadi $\frac{0}{27} = 0$

Berikut adalah daftar Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024:

Tabel 2. 2 Daftar Peraturan Menteri yang di tetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
1	PM 1 Tahun 2024	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	03 Januari 2024
2	PM 2 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi	03 Januari 2024
3	PM 3 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	03 Januari 2024
4	PM 4 Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	04 Januari 2024
5	PM 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut	28 Februari 2024
6	PM 6 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok	19 Maret 2024



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
7	PM 7 Tahun 2024	Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia	21 Maret 2024
8	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
9	PM 9 Tahun 2024	Keamanan Penerbangan Nasional	02 April 2024
10	PM 10 Tahun 2024	Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional	29 April 2024
11	PM 11 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi	07 Juni 2024
12	PM 12 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 203 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat	07 Juni 2024
13	PM 13 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 74 Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor	25 Juni 2024
14	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
15	PM 15 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04 Juli 2024
16	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Assesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	08 Juli 2024
17	PM 17 Tahun 2024	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	18 Agustus 2024
18	PM 18 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	15 Agustus 2024
19	PM 19 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem	03 September 2024



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
20	PM 20 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	06 September 2024
21	PM 21 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	06 September 2024
22	PM 22 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo	06 September 2024
23	PM 23 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	06 September 2024
24	PM 24 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	06 September 2024
25	PM 25 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	06 September 2024
26	PM 26 Tahun 2024	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	06 September 2024
27	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024



2.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA

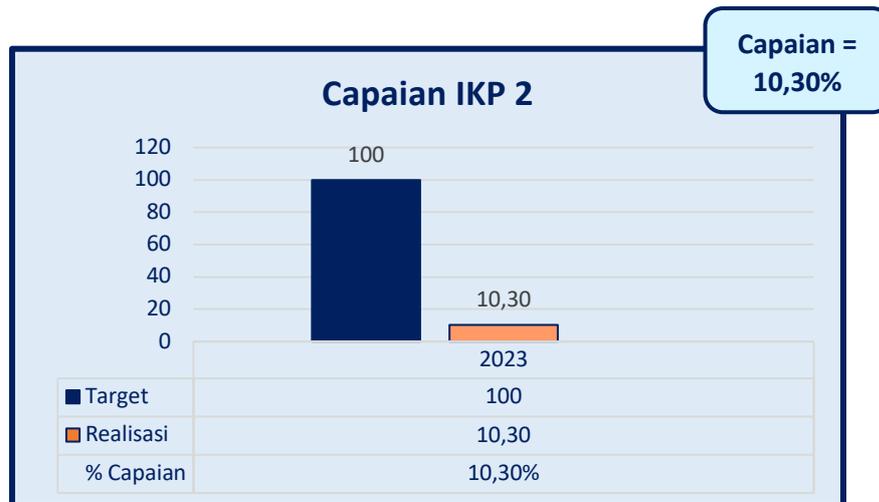
Sasaran Program Kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan” terdiri dari 1 (satu) IKP, yaitu;

IKP2 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ Pada Tahun 2024”

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **PPTB**, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ Pada Tahun 2024 pada akhir September 2024 mendapatkan capaian sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP2 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Jul	Ags	Sep	
IKP2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100	6	6	10,30	10,30%



Gambar 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 2 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024

Sektor transportasi perlu secara konsisten berkontribusi untuk menurunkan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sub sektor transportasi untuk menurunkan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sub sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi GRK (CO₂) yang cukup signifikan di bawah sektor energi, sehingga perlu dilakukan upaya – upaya aksi mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim. Kementerian Perhubungan dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi utama dalam membangun infrastruktur transportasi dalam rangka menjalin konektivitas nasional, perlu memperhatikan aspek – aspek pembangunan transportasi yang rendah karbon, baik dalam pengembangan



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

sarana maupun prasarana, pelaksanaan manajemen transportasi, penggunaan teknologi serta pengembangan transportasi massal sehingga terciptanya pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya dihitung berdasarkan target penurunan emisi setiap tahun sampai dengan 2024 sebanyak 5,13 juta ton CO₂, mengacu pada potensi aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (transportasi) pada *Roadmap* Aksi Mitigasi NDC (*Nationally Determined Contribution*) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pusat Pengelolaan transportasi Berkelanjutan merupakan koordinator sektor bagi tercapainya target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi, yang dapat bertugas melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mitigasi perubahan iklim dalam upaya penurunan emisi GRK sektor transportasi dilaksanakan oleh masing – masing sub sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Metode Penilaian:

Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis yaitu:

$$\% \text{ Capaian Target Penurunan Emisi GRK tahun } X = \left(\frac{\text{Penurunan Emisi tahun } X}{\text{Target Penurunan Emisi untuk tahun } X} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- % Penurunan Emisi GRK Tahun X = Persentase penurunan Emisi GRK tahun tertentu (%);
- Penurunan Emisi Tahun X = Selisih Emisi *Baseline* dan Emisi Aksi Mitigasi (Ton CO₂);
- Target Penurunan Emisi untuk Tahun X = Angka target penurunan absolut yang ditentukan pada saat perencanaan di tahun X (Ton CO₂).

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2024 target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂e. Per Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan potensi perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi tahun 2024 adalah sebesar 526.445,27 ton CO₂.

Rincian capaian aksi mitigasi dari masing – masing sub sektor pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

NO	AKSI MITIGASI SUB SEKTOR	CAPAIAN AKSI MITIGASI (Ton CO ₂ e)	%
1	Perhubungan Darat	64.470,22	1,3%
2	Perhubungan Laut	0	0
3	Perhubungan Udara	0	0
4	Perkeretaapian	461.975,05	9%
Total		526.445,27	10,30%

Angka capaian tersebut merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor Perkeretaapian. Adapun penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ penurunan emisi thd target 2024} = \left(\frac{526.445,27}{5.130.000,00} \right) \times 100\% = 10,30\%$$

$$\% \text{ Capaian Capaian thd target TWIII 2024} = \left(\frac{10,30}{100} \right) \times 100\% = 10,30\%$$

Berdasarkan target kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau 5,13 juta ton CO₂e maka capaian hasil Tahun 2024 per TW III yaitu 526.445,27 CO₂e atau 10,30%

Justifikasi Keberhasilan/tidak tercapainya target/Kendala:

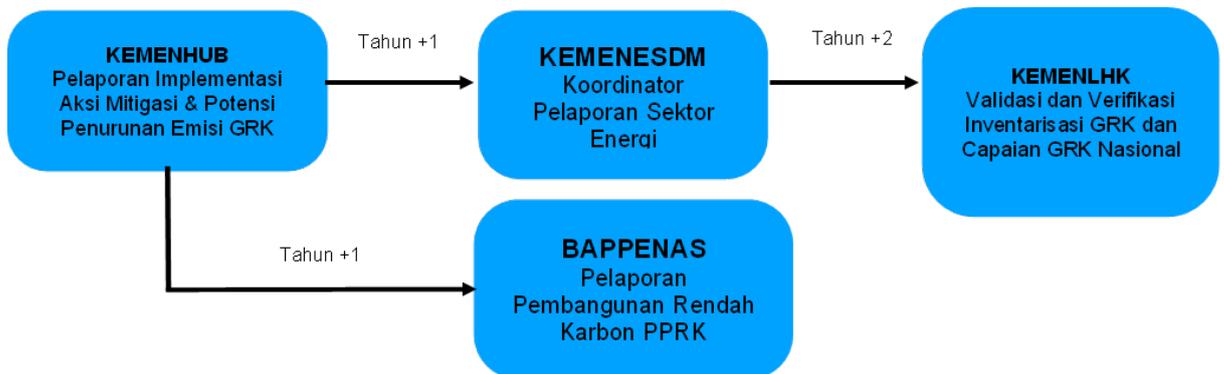
Data capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan III ini adalah tercapai sebesar 526.445,27 ton CO₂ dari target tahun 2024 sebesar 5.130.000 ton CO₂. Angka capaian tersebut merupakan hasil aksi mitigasi pemanfaatan KRL Jabodetabek dan pengembangan sistem transit - Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT dari sub sektor darat. Penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan III dapat dicapai dengan dukungan beberapa kegiatan meliputi pembentukan & sosialisasi Kelompok Kerja Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP-PHB 34 Tahun 2024), peningkatan kapasitas terkait upaya dekarbonisasi di Kementerian Perhubungan, dan koordinasi penyusunan baseline dan target bidang darat dan perkeretaapian untuk mendukung *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC), serta koordinasi awal pengumpulan data monitoring aksi mitigasi. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, capaian realisasi sebesar 526.445,27 ton CO₂ telah melebihi target triwulan III sebesar 510.000 ton CO₂. Sehingga tergambar ada upaya yang dilakukan untuk mencapai target tahunan dari Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi.



Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis:

Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor – sektor terkait. Kementerian Perhubungan (transportasi), dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi aksi mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di *website* Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Alur pelaporan GRK adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Alur Pelaporan Penurunan Emisi GRK

Pada Januari 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2023 Nasional yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk tahun 2022 salah satunya Laporan dari Kementerian Perhubungan (transportasi). Pada laporan tersebut, tercantum hasil laporan penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi yaitu 3.354.092 Ton CO₂, sedangkan untuk khusus aksi Penghijauan di Lingkungan Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 Ton CO₂ dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya.



Upaya Pencapaian Target

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi Inventarisasi data aktivitas untuk masing - masing aksi mitigasi GRK;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian ESDM, BAPPENAS, dan KLHK);
5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan *baseline* dan target capaian aksi mitigasi;
6. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya.

2.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA

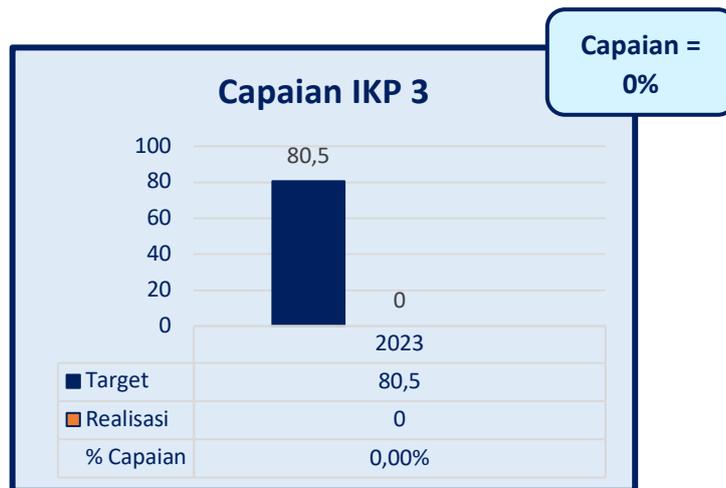
Sasaran Program Ketiga “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, terdiri dari 1 (satu) IKP, antara lain;

IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **Biro SDMO**, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada akhir September 2024 belum dapat dihitung dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP3 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Jul	Ags	Sep	
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5	0	0	0	0



Gambar 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 3 Triwulan III terhadap Target PK Tahun 2024

Analisis Capaian:

Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 menargetkan Indeks RB sebesar 80,5, namun sesuai hasil LHE dari Kementerian PAN dan RB bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan Nilai Indeks RB 77,82 yang sebelumnya mendapatkan Nilai Indeks RB 75,82. Perubahan Nilai Indeks RB mengalami penyesuaian dikarenakan adanya penambahan Skor pada Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi. **Adapun nilai capaian tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada akhir tahun.**

Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan pada nilai akhir skor yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 203, yang sebelumnya nilai skor maksimal ditetapkan 100 berubah menjadi 110 yang terbagi menjadi skor RB General 100 dan skor RB Tematik 10. Meskipun nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan mengalami peningkatan yang sebelumnya mendapatkan kategori BB dengan predikat baik, pada tahun 2023 mendapatkan kategori BB dengan predikat sangat baik.

Adapun target pada Triwulan I yaitu merevisi Road Map RB menyesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 dan KemenenPAN RB Nomor 739 Tahun 2024 yang didalamnya terdapat penyesuaian indikator sasaran strategis 1 (terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan kolaboratif) dan indikator sasaran strategis 2 (terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional).



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Pada Triwulan III Kementerian Perhubungan telah mendapatkan kembali penyesuaian Nilai Indeks RB tahun 2023 sebesar 85,26 yang sebelumnya mendapatkan nilai indeks 77,82. Penyesuaian tersebut diperoleh dari afirmasi pada nilai RB General dan RB Tematik yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Adapun hasil Afirmasi Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dijadikan dasar sebagai pengajuan usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan dan telah disetujui Kementerian PAN dan RB dengan telah diterbitkannya Surat Permohonan Izin Prinsip oleh Kementerian PAN dan RB. Sebagai data dukung dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada hari Rabu, 17 Januari 2024;
- b. Telah dilaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Rabu, 21 Februari 2024;
- c. Menghadiri undangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Senin, 26 Februari 2024;
- d. Telah dilaksanakan kegiatan Reviu hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis s.d Sabtu, 29 Februari s.d 2 Maret 2024;
- e. Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Biro SDM dan Organisasi kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Biro SDM dan Organisasi Nomor. 261/Ro.II/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi RB 2023 dan Capaian Triwulan I Rencana Aksi RB Bidang SDM dan Kelembagaan Tahun 2024;
- f. Menghadiri undangan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik terkait kegiatan reviu data isian revisi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Rabu, 27 Maret 2024;
- g. Telah dilaksanakan kegiatan tindak lanjut dan persiapan pemenuhan dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis, 4 Juli 2024;
- h. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan teknis, inventarisir dan verifikasi dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Senin, 8 Juli 2024;
- i. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan teknis dan penyampaian dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Selasa, 16 Juli 2024;
- j. Menghadiri undangan dari Dirjen Perhubungan Laut terkait kegiatan Workshop Penataan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 Tahap I pada hari Senin s.d Selasa, tanggal 22 s.d 23 Juli 2024;



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

- k. Telah dilaksanakan kegiatan tindak lanjut penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;
- l. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024;
- m. Telah dilaksanakan kegiatan penyiapan data dukung pelaksanaan RB
- n. General tahun 2023 s.d 2024 dalam rangka peningkatan penilaian RB guna penyesuaian tunjangan kinerja pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;
- o. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan pemuktakhiran data rencana aksi RB Tematik Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024;
- p. Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan finalisasi rencana aksi RB Tematik tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 12 s.d 14 September 2024;
- q. Menghadiri undangan dari Inspektorat Jenderal terkait pembahasan hasil evaluasi Ex Ante penyesuaian rencana aksi RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024;
- r. Telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi On-Going Triwulan III Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024;
- s. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja selaras dengan penilaian IPASN Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
- t. Nilai IPASN Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mencapai nilai 81,34 dengan kategori tinggi;
- u. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam hari Jumat tanggal 20 September 2024.

Upaya Pencapaian Target

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya, di antaranya adalah:

- 1. Kemenhub telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2. Kemenhub saat ini sedang dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil revidi terhadap proses bisnis.
- 3. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi.
- 4. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, Kemenhub telah menetapkan Keputusan Menhub Nomor KM 69 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.



2.2.4 CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam mendukung terwujudnya Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal, terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang dilaksanakan oleh unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1,1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Biro Hukum	Nilai	76	85,3	112,24%
	1,2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Biro Hukum	Nilai	60	90,63	151,05%
Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	2,1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	PPTB	%	100	10,30	10,30%
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3,1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	80	78,89	98,61%
	3,2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan	Nilai	81	80,08	98,86%
	3,3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Biro Umum	Nilai	92,30	N/A	N/A
	3,4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Biro Umum	Nilai	92,30	N/A	N/A
	3,5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	3,6	3,835	106,53%
	3,6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	85	98,07	115,38%
	3,7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan	Nilai	85	70	82,35%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
	3,8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Biro LPPBMN	Nilai	80	78,37	97,96%
	3,9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan	Nilai	90,2	73,88	81,91%
	3,10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Biro LPPBMN	Indeks	2,95	2,34	79,32%
	3,11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Biro LPPBMN	Nilai	3,10	3,21	103,55%
	3,12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	Biro Umum	%	74	N/A	N/A
Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	3,13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	Nilai	80	60	75,00%
	3,14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	Nilai	0,75	0	0,00%
	3,15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Pusbin Jabfung	Nilai	82	83,08	101,32%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3,16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	PPTB	Nilai	4,45	0	0,00%
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3,17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	BKIP	Nilai	79	0	0,00%
Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	3,18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Pusdatin	Nilai	3,75	4,27	113,87%
Meningkatnya kualitas manajemen	3,19	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan	KNKT	%	58	44,55	76,80%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
keselamatan transportasi	Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder					
	3,20 Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	Mahpel	%	75	23,52	31,36%
Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3,21 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	PFKKI	Nilai	87	46,28	53,20%
	3.22 Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	PPIT	%	75	50	66,67%

Adapun berdasarkan hasil capaian dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal, rata – rata capaian berada di angka **75,28% (tujuh puluh lima koma dua puluh delapan persen)**, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal telah dicapai dengan cukup baik sampai dengan periode Triwulan III 2024.

2.3 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN III TAHUN 2024

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang targetnya tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2024 terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program serta didukung dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Unit Eselon II Setjen didukung dengan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2023 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**. Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami penyesuaian berupa penambahan alokasi anggaran sehingga sampai dengan 31 Juni 2024, pagu Efektif Sekretariat Jenderal menjadi **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima**



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah).

Sampai akhir bulan September tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan September sebesar **Rp425.015.588.738,- (empat ratus dua puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau **64,91% (enam puluh empat koma sembilan puluh satu persen)** sisa dana belum terserap sebesar **Rp229.780.016.262,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)** atau **35,09% (tiga puluh lima koma nol sembilan persen)** dari total alokasi anggaran.

Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal:

Dari total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024, alokasi anggaran terbagi kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan jenis belanja, di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana rincian alokasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan III tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)			Total (Rp)
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Biro Perencanaan	-	26.533.678.000	850.000.000	27.383.678.000
2	Biro SDMO	-	18.102.183.000	400.000.000	18.502.183.000
3	Biro Keuangan	-	17.789.666.000	1.275.000.000	19.064.666.000
4	Biro Hukum	-	15.124.000.000	-	15.124.000.000
5	Biro KIP	-	24.361.247.000	2.072.633.000	26.433.880.000
6	Biro Umum	123.436.560.000	142.723.675.000	30.527.331.000	296.687.566.000
7	Biro LPPBMN	-	30.150.900.000	964.298.000	31.115.198.000
8	PFKKI	886.593.000	37.623.004.000	5.349.733.000	43.859.330.000
9	Pusdatin	1.748.294.000	46.696.157.000	12.698.222.000	61.142.673.000
10	Mahpel	10.075.335.000	11.235.704.000	861.000.000	22.172.039.000
11	PPIT	2.147.531.000	18.993.593.000	365.000.000	21.506.124.000
12	PPJFT	1.772.483.000	9.693.826.000	1.059.651.000	12.525.960.000
13	PPTB	1.555.343.000	11.257.667.000	438.500.000	13.251.510.000
14	KNKT	14.345.562.000	31.584.807.000	96.429.000	46.026.798.000
Total		Rp155.967.701.000	Rp441.870.107.000	Rp56.957.797.000	Rp654.795.605.000

Sumber: Biro Keuangan, September 2024



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Berdasarkan, data di atas, dari total pagu Sekretariat Jenderal sebesar **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)** komposisi terbesar terdapat pada alokasi **Belanja Barang yaitu 67% (enam puluh tujuh persen)** dari total pagu atau sebesar **Rp441.870.107.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh ribu rupiah)** kemudian diikuti dengan **Belanja Pegawai dengan komposisi 24% (dua puluh empat persen)** dari total pagu atau sebesar **Rp155.967.701.000,- (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus seribu rupiah)** dan **Belanja Modal dengan komposisi 9% (sembilan persen)** atau sebesar **Rp56.957.797.000,- (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan September sebesar **Rp425.015.588.738,- (empat ratus dua puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau **64,91% (enam puluh empat koma sembilan puluh satu persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp229.780.016.262,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam belas ribu dua ratus dua rupiah)** atau **35,09% (tiga puluh lima koma nol sembilan persen)** dari total pagu anggaran. Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran Triwulan III UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Biro Perencanaan	27.383.678.000	18.483.410.560	67,50%
2	Biro SDMO	18.502.183.000	11.094.971.167	59,97%
3	Biro Keuangan	19.064.666.000	14.171.673.740	74,33%
4	Biro Hukum	15.124.000.000	9.716.284.493	64,24%
5	Biro KIP	26.433.880.000	14.643.029.614	55,39%
6	Biro Umum	296.687.566.000	202.596.683.828	68,29%
7	Biro LPPBMN	31.115.198.000	23.223.243.441	74,64%
8	PFKKI	43.859.330.000	21.612.210.719	49,28%
9	Pusdatin	61.142.673.000	27.568.664.772	45,09%
10	Mahpel	22.172.039.000	15.543.696.861	70,10%
11	PPIT	21.506.124.000	12.023.308.421	55,91%
12	PPJFT	12.525.960.000	8.457.102.988	67,52%
13	PPTB	13.251.510.000	9.762.321.680	73,67%
14	KNKT	46.026.798.000	36.118.986.454	78,47%
Total		Rp654.795.605.000	Rp425.015.588.738	64,91%

Sumber: Biro Keuangan



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan September tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp155.967.701.000,-** (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus seribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp117.088.182.793,-** (seratus tujuh belas miliar delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau **75% (tujuh puluh lima persen)** dari pagu anggaran belanja pegawai.

Tabel 2. 8 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Pegawai	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-
2	Biro SDMO	-	-
3	Biro Keuangan	-	-
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	-	-
6	Biro Umum	123.436.560.000	94.775.495.907
7	Biro LPPBMN	-	-
8	PFKKI	886.593.000	886.582.187
9	Pusdatin	1.748.294.000	1.748.291.460
10	Mahpel	10.075.335.000	6.071.273.801
11	PPIT	2.147.531.000	2.147.526.159
12	PPJFT	1.772.483.000	1.772.477.470
13	PPTB	1.555.343.000	1.555.334.233
14	KNKT	14.345.562.000	8.131.201.576
Total		Rp155.967.700.000	Rp117.088.182.793

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Barang:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Barang sebesar **Rp441.870.107.000,-** (empat ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp273.319.306.400,-** (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah) atau **62% (enam puluh dua persen)** dari pagu anggaran belanja barang.



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Tabel 2. 9 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Triwulan III 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Barang	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	26.533.678.000	17.689.181.155
2	Biro SDMO	18.102.183.000	10.736.271.167
3	Biro Keuangan	17.789.666.000	13.399.248.740
4	Biro Hukum	15.124.000.000	9.716.284.493
5	Biro KIP	24.361.247.000	13.362.052.322
6	Biro Umum	142.723.675.000	82.928.267.279
7	Biro LPPBMN	30.150.900.000	22.593.806.743
8	PFKKI	37.632.004.000	18.485.168.224
9	Pusdatin	46.696.157.000	24.611.774.522
10	Mahpel	11.235.704.000	8.611.423.060
11	PPIT	18.993.593.000	9.510.782.962
12	PPJFT	9.693.826.000	5.943.400.898
13	PPTB	11.257.667.000	7.769.687.447
14	KNKT	31.584.807.000	27.961.957.388
Total		Rp441.870.107.000	Rp273.319.306.400

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Modal:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar **Rp56.957.797.000,-** (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp34.608.099.544,-** (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan juta sembilan puluh sembilan lima ratus empat puluh empat rupiah) atau **61% (enam puluh satu persen)** dari pagu anggaran belanja modal.

Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Belanja Modal Setjen Triwulan III 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Modal	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	850.000.000	794.229.405
2	Biro SDMO	400.000.000	358.700.000
3	Biro Keuangan	1.275.000.000	772.425.000
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	2.072.633.000	1.280.977.292
6	Biro Umum	30.527.331.000	24.892.920.642
7	Biro LPPBMN	964.298.000	629.436.698
8	PFKKI	5.349.733.000	2.240.460.307
9	Pusdatin	12.698.222.000	1.208.598.790



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

No.	Unit Kerja	Belanja Modal	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
10	Mahpel	861.000.000	861.000.000
11	PPIT	365.000.000	364.999.300
12	PPJFT	1.059.651.000	741.224.620
13	PPTB	438.500.000	437.300.000
14	KNKT	96.429.000	25.827.490
Total		Rp56.957.797.000	Rp34.608.099.544

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Anggaran Untuk Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Selain itu, untuk mendukung tercapainya target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024, diperlukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, berikut adalah rincian alokasi anggaran serta realisasinya untuk tiap indikator kinerja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2024
Tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	7.158.506.000	5.472.773.595	76,45%
IKP2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	259.422.128	44,94%
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	778.198.000	684.746.547	87,99%
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	7.158.506.000	5.472.773.595	76,45%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	259.422.128	44,94%
IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	596.774.000	342.805.400	57,44%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	314.348.000	270.945.000	86,19%
IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	1.275.656.000	1.227.839.214	96,25%
IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal			
IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	416.433.000	272.550.000	65,45%
IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	6.040.664.000	5.155.370.510	85,34%
IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	590.000.000	437.460.700	74,15%
IKK 3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	2.906.187.000	2.407.525.668	82,84%
IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	2.900.310.000	2.007.919.167	69,23%
IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	2.009.288.000	1.715.325.158	85,37%
IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal			
IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	132.252.025.000	52.178.223.233	39,45%
IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	1.143.614.000.00	570.645.216	49,90%
IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	11.931.330.000	7.358.063.392	61,67%
IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	2.125.997.000	1.116.366.357	52,51%
IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	1.407.162.000	930.951.153	66,16%
IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	26.433.880.000	15.819.113.738	61,65%
IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	355.880.000	72.017.312	20,24%
IKK 3.19	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder	12.104.462.000	12.070.285.692	99,72%
IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	150.000.000	64.406.000	78,81%
IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	4.441.054.000	2.532.999.613	57,04%
IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	20.572.698.000	12.023.309.215	58,44%



2.4 KENDALA YANG DIHADAPI TRIWULAN III SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal pada periode Triwulan II, diantaranya:

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja perkantoran dan layanan belum optimal;
2. Aplikasi pemantauan capaian serta evaluasi yang belum terintegrasi;
3. Proses pengumpulan data yang perlu menunggu hasil penilaian oleh K/L lain berdampak pada tercapainya capaian kinerja IKK Sekretariat Jenderal yang kurang optimal.



BAB - III

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Penyusunan laporan Triwulan III Sekretariat Jenderal dilakukan dan disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja melalui unit kerja Eselon II yang ada dibawahnya.

Sampai dengan akhir bulan September tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan September sebesar **Rp425.015.588.738,- (empat ratus dua puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** atau **64,91% (enam puluh empat koma sembilan puluh satu persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp229.780.016.262,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)** atau **35,09% (tiga puluh lima koma nol sembilan persen)** dari total alokasi anggaran.

Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 telah mengalami reviu yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal. Adapun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir September 2024 mencapai **36,77%**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:

1. IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian sebesar 100%;



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Sekretariat Jenderal

2. IKP 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 dengan capaian yaitu 10,30%;
3. IKP 3 adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian masih 0% dikarenakan penilaian dilakukan di akhir tahun.

3.2 SARAN

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berikut ini adalah beberapa saran/rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- a. Menyusun langkah-langkah konkrit dalam menindaklanjuti ketidakcapaian realisasi terhadap target.
- b. Menelaah kembali manual Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Renstra Periode selanjutnya.
- c. Melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal secara berkala.



@Kemenhub151